

**KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM JOINT  
COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) PADA TAHUN 2015**

*(The United States National Interest on Joint Comprehensive Plan of Action In the Year of  
2015)*

MERISA DWI JUANITA  
20130510153

**Jurusan Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial Politik**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183**

*merisajuanita@gmail.com*

**Abstract**

*This research aim to know about national interest of United States on Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in the year of 2015 after three decades of rejection through a monumental agreement there was a bilateral relationship benefiting both sides. This research is a descriptive research that explain how united states change their foreign policy that originally used hard power during the bush president become soft power by way of discussions and negotiations on the president Obama*

*Results of this study is showed that the United States can reach it national interest by using soft power diplomacy, reduced uranium on iran nuclear development feared to become a nuclear weapons, Obama as president holds his veto rights for the sake of national interests. After the agreement was signed the United States has good relations with Iran and other Islamic countries despite the rejection of political interests in the country and abroad it becomes the advantage of both parties*

**Keywords : United States, Iran, National Interest, Nuclear Weapons.**

## A. Pendahuluan

Amerika Serikat adalah negara adidaya pemenang perang dunia kedua, sebagai negara pemenang Amerika Serikat memiliki hak untuk mengatur keamanan di dunia mengatasnamakan Dewan Keamanan. Kemenangan dalam perang membuat Amerika memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan keamanan internasional, salah satunya pelarangan perakitan nuklir sebagai senjata. Kebijakan Amerika Serikat dalam melimitasi perakitan nuklir disebabkan atas bahaya yang ditimbulkan oleh nuklir ketika perang dunia berlangsung.

Energi Nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom ada dua tujuan pembuatan nuklir yakni sebagai pembangkit listrik dan sebagai senjata. Nuklir sebagai pembangkit listrik merupakan energi masa depan yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan rumah tangga, industri, penerangan, dan lain-lain. Penggunaan uranium dalam reaktor nuklir dinilai aman dan ekonomis untuk memproduksi listrik sebagai contoh 1 uranium mempunyai kandungan energi setara dengan 150 kg batubara<sup>1</sup>. Nuklir sebagai senjata, merupakan dualisme kepemilikan nuklir yang dikhawatirkan banyak pihak karena dapat menjadi ancaman negara lain. Ketika melakukan program pembangkit listrik oleh tenaga nuklir dapat pula membuat bom nuklir sebagai senjata seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia kedua dan digunakan untuk pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang mengakibatkan rakyat sipil terluka dan meninggal dalam sekejap saat bom atom dijatuhkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat di Hiroshima dengan perangkat yang dinamakan "*Little Boy*". Kejadian yang sama terjadi di Nagasaki oleh bom atom yang dinamakan "*Fat Man*". Parahnya, dalam hitungan bulan dan tahun setelah pemboman dahsyat itu ribuan

---

<sup>1</sup> Ir. F.P. Sagala dkk, *BATAN Model Atom dan Prospeknya sebagai Energi Masa Depan*, (Jakarta: Mei 2003) 13-17

orang meninggal akibat radiasi nuklir, efek yang berkepanjangan dan dapat memusnahkan tumbuhan yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah radiasi sinar alpha, beta dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu partikel-partikel neutron yang dihasilkan juga berbahaya.

Dengan adanya permasalahan terkait nuklir yang diproduksi sebagai senjata membuat Negara-negara dan komunitas internasional terancam dan sepakat untuk membentuk rezim yang dapat menahan perkembangan nuklir sebagai senjata. *Non Proliferation Treaty* (NPT) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir dan senjata, untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk mencapai tujuan mencapai pelucutan senjata nuklir dan pelucutan senjata secara keseluruhan dan lengkap. Perjanjian tersebut merupakan satu-satunya komitmen yang mengikat dalam sebuah perjanjian multilateral terhadap tujuan pelucutan senjata oleh negara-negara senjata nuklir. Dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1968, Perjanjian mulai berlaku pada tahun 1970<sup>2</sup>. NPT menetapkan aturan mengenai kepemilikan senjata nuklir, baik bagi negara yang memiliki senjata nuklir juga bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Bagi negara yang memiliki senjata nuklir dilarang mendistribusikan senjata nuklir tersebut kepada negara-negara yang tidak memiliki nuklir. Selain itu, dalam NPT ini juga terdapat kesepakatan antar negara-negara yang memiliki nuklir seperti Amerika, Inggris, Rusia, Tiongkok, serta Prancis untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir, hingga lambat laun dapat menghilangkan senjata nuklir tersebut dari muka bumi. Pada negara-negara non-nuklir terdapat

---

<sup>2</sup> United Nation, "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)", <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, diakses pada 11 Januari 2016

larangan untuk tidak menciptakan dan mengembangkan senjata nuklir. Sedangkan bagi negara-negara yang memiliki energi nuklir yang kemudian dimanfaatkan sebagai industri, teknologi, tenaga pembangkit atau untuk *peaceful nuclear energy* diperbolehkan untuk mengembangkannya, namun kemudian harus bersedia untuk membuka negaranya akan adanya inspeksi-inspeksi dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA), serta mentaati aturan perlingkungannya yaitu *IAEA Safeguards*. Peraturan-peraturan tersebut berlaku bagi seluruh negara yang telah menandatangani NPT. Pada akhir tahun 1997, negara yang bergabung dalam NPT berjumlah 180 negara non-nuklir, serta 5 negara awal pemilik nuklir yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis<sup>3</sup>.

Kelima negara tersebut dijadikan dewan keamanan PPB dan menjadi *Nuclear Weapon States* (NWS) Dalam perjanjian tersebut kelima negara NWS telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS. Di timur tengah Iran ikut serta dalam meratifikasi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir namun Iran menyatakannya ketertarikan dalam pengayaan nuklir.

Namun pada kepemimpinan George Walker Bush (2001-2009) Amerika digemparkan dengan program nuklir yang dijalankan Iran, Iran menyatakan aktifitas pengembangan nuklir bertujuan damai yakni sebagai sumber energi alternatif dan isotop kesehatan. Namun dengan adanya peristiwa pengeboman *World Trade Center* 11 September 2001 Amerika Serikat seolah melihat program nuklir Iran adalah ancaman bagi keamanan internasional.

---

<sup>3</sup> Jones, Rodney W. et al. 1998. *Tracking Nuclear Proliferation: A Guide in Maps and Charts*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 15

Pada tahun 2003 IAEA menyatakan bahwa mereka menemukan pabrik uranium berkadar tinggi di Natanz, Iran. Produksi uranium Iran sempat dihentikan, namun pada tahun 2006 Iran kembali memproduksi setelah mengadakan perjanjian dengan IAEA<sup>4</sup>. Kecaman dan deretan resolusi sanksi dijatuhkan dari Dewan Keamanan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Iran dikenakan sanksi internasional untuk menghentikan aktifitas nuklirnya sementara, sanksi tersebut termasuk juga sanksi ekonomi sebagai balasan atas ketidakpatuhannya berulang kali Iran mendapat ancaman kekuatan militer. Situasi tersebut tidak membuat Iran mundur, atas nama hak nasional bangsa Iran program nuklir terus dikembangkan tanpa bantuan dari Amerika.

Presiden Iran periode Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) memiliki fokus pada masalah dalam negeri menilai apabila memiliki nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik akan sangat menguntungkan. Dengan langkah kongkrit Ahmadinejad mendirikan pengayaan uranium di Isfahan untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang terjadi di Iran. Proyek nuklir yang digagas mengalami peningkatan pesat, banyak anak muda Iran menyatakan ketertarikan dalam berkontribusi dengan memilih jurusan nuklir sebagai bidang studi.

Pada 4 Februari 2006 IAEA sepakat untuk melaporkan kegiatan nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB, Keputusan ini diambil oleh IAEA dengan alasan khawatir kegiatan nuklir Iran bukan untuk tujuan perdamaian. Walau pemerintah Teheran menyatakan pengayaan uranium untuk pembangkit tenaga listrik, negara-

---

<sup>4</sup> CNN International, "10 Fakta Mengenai Nuklir Iran",  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-iran/>,  
diakses pada 5 Februari 2017

negara Barat tetap saja menuding Iran bermaksud membuat senjata nuklir. Sementara Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad tak peduli dengan reaksi Barat<sup>5</sup>.

Memasuki tahun kepemimpinan Presiden Obama (2009-2013) pencapaian kesepakatan mengenai nuklir dengan Iran masih menjadi tantangan bagi kebijakan luar negeri Amerika, walau tidak lagi memakai cara *hard power military* pada masa Obama sanksi yang dijatuhkan ternyata lebih ketat, dengan dukungan masyarakat Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan dengan negara Timur Tengah termasuk Iran, Obama melakukan komunikasi bilateral dengan Presiden Iran Hassan Rouhani (2013) dan dimulainya jalur diskusi serta negosiasi.

Kesepakatan nuklir Iran dengan Amerika Serikat telah berhasil dicapai pada 14 Juli 2015 di Wina Austria, yang dinamakan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan dengan kesepakatan tersebut adalah akhir dari jalur yang terputus dan menggandeng Iran adalah sebuah awal baru bagi dunia. Perundingan tersebut diikuti oleh Iran dan enam kekuatan dunia yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia dan Jerman yang dimulai pada tahun 2006<sup>6</sup>. Kelompok P5+1 menginginkan Iran mengurangi kegiatan nuklir yang merupakan isu peka untuk memastikan negara tersebut tidak bisa membuat senjata nuklir. Kesepakatan yang sangat bergantung pada persetujuan Amerika Serikat dan Iran tersebut, telah berlangsung secara intensif dan mengalami proses pasang-surut dan pembicaraan yang alot, yang sempat mengalami kebuntuan selama rentang waktu yang lam. Lambat laun Amerika melihat adanya keuntungan yang didapat apabila menyetujui program nuklir Iran tidak menganggapnya sebagai ancaman

---

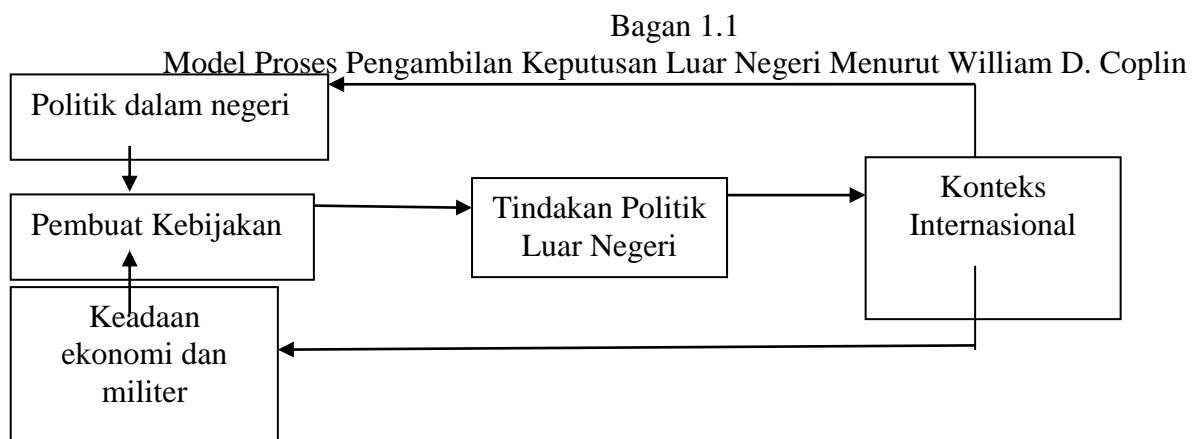
<sup>5</sup> Liputan 6, "IAEA Sepakat Melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB", <http://global.liputan6.com/read/117095/iaea-sepakat-melaporkan-iran-ke-dewan-keamanan-pbb>, diakses pada 9 Januari 2017

<sup>6</sup> BBC, "Dunia menyambut baik kesepakatan nuklir Iran", [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714\\_dunia\\_iran\\_nuklir\\_reaksi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_iran_nuklir_reaksi), diakses pada 10 Januari 2017

Dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apa yang membuat Amerika setuju terhadap penggunaan nuklir di Iran

## B. Landasan Teoritik

Teori dapat menggabungkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang dapat menunjukkan bagaimana konsep-konsep secara logis dan saling berhubungan. Untuk menjawab pertanyaan mengapa Amerika dapat menyetujui perjanjian Nuklir Iran tahun 2015 dengan mengulik isi pembuatan keputusan luar negeri yang penulis gunakan adalah Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri oleh William D. Coplin. Menurut William D. Coplin dalam bukunya Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga aspek pertimbangan yaitu kondisi politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi dan militer dan konteks Internasional<sup>7</sup>. Berikut merupakan model teori pengambilan keputusan luar negeri:



### A.1 Kondisi Politik Dalam Negeri

Coplin menjelaskan bahwa keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang didalamnya melibatkan berbagai aktor politik yang juga mempunyai kepentingan tertentu. Para aktor politik tersebut disebut sebagai “policy

---

<sup>7</sup> Coplin, W. D. (1992), “Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction to international politics: a theoretical overview”, Bandung: Sinar Baru.

*influencer*” yaitu para pendukung rezim tertentu dalam suatu pemerintahan negara dan rezim tersebut membutuhkan dukungan untuk menguatkan legitimasinya<sup>8</sup>.

Pasca tragedi 9/11 Presiden Bush semakin menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin negara adidaya. Bush menerapkan doktrin *pre-emptive strike*, yakni melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman dan mengambil tindakan lebih. Doktrin *pre-emptive strike* tersebut merupakan doktrin yang diusung oleh Presiden Bush beserta tokoh-tokoh Neo-konservatif Amerika yang berpandangan uniteralisme, tokoh-tokoh tersebut diantaranya Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle sebagai Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan, dan Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan<sup>9</sup>.

Amerika Serikat memakai sistem dua Partai Politik. Partai Republik di sayap kanan yang berhaluan konservatif dan Partai Demokrat di sayap kiri yang berhaluan liberalis. Dalam memformulasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ketika dipimpin oleh Presiden dari Partai Republik tidak terlepas dari peranan pemikiran kelompok Neo-konservatif Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri yang unilateralis dengan mengutamakan dominasi militer merupakan ciri khas dari kelompok Neo-konservatif<sup>10</sup>. Kelompok Neo-konservatif mulai berkembang pada 1917 dipelopori para pemikir alumni Universitas Yale yang kini disebut dengan *Skull and Bone*<sup>11</sup>. Sejak awal berkembangnya Neo Konservatif dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki pengaruh dalam ekonomi Amerika Serikat seperti *Standart Oil, Brown Brothers, Harriman Banking, Halliburton, dan Manhattan*.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Hamzah, Alfian & Musa Kazhim 2007, *Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran Skenario Penghabisan*, Cahaya Insan Suci, Jakarta

<sup>10</sup> Anwar, Dewi Fortuna, “Tatatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat”, *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 3, No. 2, Mei-September 200, hlm. 7-28

<sup>11</sup> Hendraji, dkk 2010, *Tangan tangan Amerika “Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia”*, Global Future Institute, Jakarta



Tujuan dari kelompok Neo-konservatif adalah untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat diseluruh dunia dengan segala cara<sup>12</sup>, dengan visi utama kelompok Neo-konservatif AS pasca Perang Dingin adalah menjaga ketertiban dunia dengan mempertahankan hegemoni Amerika Serikat terutama keunggulan militernya serta mencegah negara lain untuk membangun kemampuan yang dapat menyaingi hegemoni Amerika Serikat, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Eropa Barat, Asia Timur, wilayah bekas Uni Soviet dan Asia Barat Daya. Hal ini yang menyebabkan para tokoh Neo-Konservatif memilih untuk bertindak secara uniteralisme dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya<sup>13</sup>. Kelompok inilah yang dapat menggerakkan Presiden Amerika dari Partai Republik sebagai kelompok yang berpengaruh dan kuat, Neo-Konservatif dianggap sebagai kelompok fundamentalis yang dapat memformulasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk pada kasus Nuklir Iran.

Sedangkan di sayap kiri Partai Demokrat dipahami sebagai koalisi kelompok sosial yang kepentingannya dilayani oleh berbagai bentuk kegiatan pemerintah. Sebagian besar Demokrat kurang berkomitmen pada prinsip liberalisme, ia lebih berfokus pada perumusan program pemerintah yang mencakup kepentingan rakyat. Konstituensi yang beraliansi dengan demokratik membuat tuntutan konkrit yang mewakili kepentingan sosial masyarakat yang seringkali kali berkompromi untuk mendapatkan pencapaian tujuan mereka secara parsial. Berbeda dengan Partai Republik, Demokrat tidak memiliki gerakan internal kuat yang dirancang untuk menerapkan disiplin ideologis pada pejabat terpilih, Partai Demokrat memberi lebih banyak kebebasan kepada para pemegang jabatan. Perwakilan Partai Demokrat hanya

---

<sup>12</sup> Yuliantoro, NurRachmat 2005, "Hegemoni Amerika Pasca 11/0: Menuju Sebuah Imperium Amerika Baru ?", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No.1, Juli, hlm.79

<sup>13</sup> Anwar, Dewi Fortuna, "Tatatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat", Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003, hlm.17

fokus untuk melakukan manuver secara pragmatis yang dapat membantu Amerika Serikat mendapatkan untung dari setiap kebijakan yang dilakukannya. Partai Demokrat membantah bahwa partai tersebut memiliki filosofi yang sama untuk mengarahkan tindakan pemegang kekuasaan, apabila Partai Republik memiliki filosofi yang sama Partai Demokrat bedasarkan kepercayaan kelompok sosial, yang terpenting bagaimana perwakilannya tersebut dapat memenuhi keinginan sebagian besar masyarakat<sup>14</sup>.

Selain pengaruh Neo Konservatif, dalam mengambil kebijakan Berikut adalah *stake holder* yang mempunyai andil dalam mengambil keputusan luar negeri Amerikat Serikat; Presiden, Kongres, *Central Intelegence Agency* (CIA), Kelompok kepentingan yang didalamnya ada *human rights watch*, *amnesty internastional*, *rotary international*, *the zionist organization*. *The roman catholic cruch*, *the brookings institution*, serta kelompok-kelompok etnis dan Cina, Jepang, Polandia, Perancis, dan lain-lain. Dua kelompok kepentingan terkemuka adalah Lobi Yahudi dan Lobi Tiongkok. Bila Lobi Tiongkok selalu mengusahakan agar memasukan unsur komunis komunis, maka Lobi Yahudi selalu menekan pemerintah Amerika Serikat agar menjalankan politik luar negeri yang menguntungkan Israel<sup>15</sup>.

### **C. Metode Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisa eksplanatif. Fenomena yang akan penulis teliti adalah kepentingan amerika dalam Perjanjian Nuklir Iran JCPOA pada tahun 2015. Data literatur yang relevan dan dapat di gunakan berupa jurnal, buku, diktat kuliah dan artikel berita. Data

---

<sup>14</sup> Matt Grossmann and David A. Hopkins, " Ideological Republicans and Group Interest Democrats: The Asymmetry of American Party Politics", <http://www.matthewg.org/ideologicalrepublicans.pdf>, diakses pada 1 Juni 2017

<sup>15</sup> Cipto Bambang Dr, Politik dan Pemerintahan Amerika, Lingkaran, Yogyakarta, hlm.207-208

tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori pembuatan keputusan luar negeri yang telah dijelaskan diatas. Penulis yakin metode tersebut sangat efektif untuk mendukung argumen penulis

#### **D. Hasil Penelitian**

Dalam menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki karakteristik bergantung pada Presiden dari partai mana yang berkuasa. Presiden sebagai eksekutif bertanggung jawab dalam membuat kebijakan luar negeri sesuai persetujuan kongres sebagai perwakilan rakyat dan Partai Politik. Masing-masing Partai Politik memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kepentingan nasional. Karakter isolasionisme dipakai saat pemerintahan awal Amerika Serikat untuk melindungi dalam negeri dari konflik yang berkepanjangan di Eropa dan dunia. Realisme sebagai karakter Partai Republik yang menggunakan *hard power* sebagai alat mencapai kepentingan nasional, sedangkan pragmatisme adalah karakter Partai Demokrat yang senantiasa mencari keuntungan dengan bersikap terbuka menggunakan *soft power* menggunakan perundingan dan negosiasi.

Amerika Serikat yang selama ini tidak terlibat dalam perang mengganti kebijakan politik luar negerinya menjadi agresor setelah diserang Jepang di Pearl Harbor, semenjak itu Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang melibatkan diri dalam perang berskala dunia untuk melindungi negaranya dari serangan negara lain. Sebagai upaya untuk mengakhiri perang Amerika Serikat meluncurkan bom atom ke Jepang, peristiwa tersebut mengakhiri Perang Dunia 2. Amerika Serikat memanfaatkan ilmuwan untuk mengembangkan nuklir sebagai senjata untuk melindungi keamanan negaranya, namun hal ini menjadi ancaman Negara lain karena ketakutan diserang oleh Amerika Serikat. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Tiongkok mengembangkan energi nuklir sebagai pembangkit listrik dan senjata. Maka agar

penggunaan nuklir diawasi dibuatlah perjanjian yang dinamakan *Non Proliferation Treaty* (NPT) sebagai upaya nuklir damai.

Nuklir Iran merupakan kelanjutan dari program *Atoms for Peace* Yang digalakan oleh Presiden Eisenhower pada tahun 1967. Iran diijinkan untuk mengembangkan nuklir oleh Amerika Serikat. Iran yang tergabung pada NPT memiliki hak untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Namun dengan adanya Revolusi Iran 1979 Amerika Serikat angkat kaki dari Iran karena desakan dari masyarakat dan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khomeini yang anti-barat terutama Amerika Serikat. Semenjak peristiwa tersebut hubungan Amerika Serikat dan Iran buruk dan semakin diperparah ketika Amerika Serikat menuduh Iran mengembangkan energi nuklir untuk menghasilkan senjata. Hal tersebut berulang kali dibantah Iran, bahkan penyelidikan yang dilakuka olhe IAEA sebagai isntitusi dibawah PBB pun menyatakan bahwa Energi Nuklir yang ada di Iran belum sampai tahap pembuatan senjata.

Amerika Serikat mengajukan mosi tidak percaya. Bertahun-tahun Amerika Serikat memberi sanksi dan ancaman kepada Iran yang diiikuti oleh Uni Eropa dan PBB atas desakan Amerika Serikat. Namun sanksi dan ancaman dari internasional tidak membuat Iran gentar dan terus melanjutkan pengembangan energy nuklirnya.

Dalam permasalahan program nuklir Iran terjadi perubahan kebijakan dari Presiden Bush ke Presiden Obama. Bush yang dikenal dengan menggunakan militer disetiap buntutnya perundingan dengan bergantinya Presiden menjadi Obama kebijakan untuk menemukan titik temu berubah menjadi perundingan dan negosiasi. Semenjakn terpilihnya Obama, ia mengutarakan keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-negara muslim yang sempat buruk. Obama ingin mengawali dengan membuka perundingan dalam forum internasional. Obama bahkan

memasukan Amerika Serikat dalam perundingan terkait program nuklir Iran bersama Uni Eropa-3 yakni Inggris, Prancis, dan Jerman. Obama menilai bahwa dengan kesepakatan tersebut Amerika Serikat dapat mencapai kepentingan nasionalnya untuk melucuti kekhawatiran terkait senjata nuklir, hal ini penting agar keamanan internasional dapat terjaga dan Amerika Serikat dapat kembali mendapat keuntungan berhubungan dengan Iran dan negara-negara Timur Tengah kembali setelah mendapat kepercayaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh aspek dalam negeri, ekonomi dan militer juga konteks internasional. Mengenai aspek dalam negeri perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan dari partai demokrat yang menginginkan adanya penyelesaian yang menguntungkan untuk Amerika Serikat dengan menyetujui perjanjian JCPOA Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi dari Iran. Namun pertentangan dari lobi yahudi yang tidak menginginkan perjanjian tersebut terjadi dikarenakan Iran akan menjadi ancaman besar apabila diijinkan mengembangkan nuklir. Pada aspek ekonomi dan militer, Amerika Serikat menginginkan minyak Iran yang dapat menyuplai kembali untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat berambisi menjadi penguasa tunggal Iran dengan menyingkirkan pesaing bisnisnya seperti Inggris, Jerman, Rusia, Cina, Prancis dengan cara mengancam memberi sanksi pada negara yang berinvestasi di Iran. Setelah Negara-negara lain mencabut investasi Amerika Serikat kembali menjalin hubungan baik dengan Iran. Amerika Serikat berkali-kali mengancam akan melakukan serangan militer ke Iran namun diketahui hal tersebut tidak akan terjadi karena mendapat kontra dari Negara Dewan Keamanan seperti Rusia dan Tiongkok yang mendukung program nuklir Iran. Sebelum penyerangan militer Amerika Serikat harus

mempertimbangkan posisi Iran sebagai produsen minyak dunia yang dibutuhkan Amerika Serikat sebagai, dan penutupan Selat Hormuz yang menjadi lading kilang minyak Iran. Terakhir aspek internasional merupakan bentuk tekanan untuk Amerika dari kalangan internasional. Secara geografis letak Iran yang berada di timur tengah menjadi ancaman bagi Israel negara sekutu Amerika Serikat. Israel yang juga mengembangkan nuklir akan mempunyai saingan berat. Dukungan dari Rusia dan Tiongkok dengan alasan rasional seperti tidak pernah dibuktikan secara valid bahwa Iran mengembangkan nuklir pun menjadi bahan pertimbangan Amerika Serikat yang menghabiskan waktu untuk menentang program tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ir. F.P. Sagala dkk, *BATAN Model Atom dan Prospeknya sebagai Energi Masa Depan*, (Jakarta: Mei 2003) 13-17

Jones, Rodney W. et al. 1998. *Tracking Nuclear Proliferation: A Guide in Maps and Charts*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 15

Coplin, W. D. (1992), "Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction to international politics: a theoretical overview)", Bandung: Sinar Baru.

Hamzah, Alfian & Musa Kazhim 2007, *Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran Skenario Penghabisan*, Cahaya Insan Suci, Jakarta

Anwar, Dewi Fortuna, "Tatatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat", *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 3, No. 2, Mei-September 200, hlm. 7-28

Hendraji, dkk 2010, *Tangan tangan Amerika "Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia"*, Global Future Institute, Jakarta

Yuliantoro, NurRachmat 2005, "Hegemoni Amerika Pasca 11/0: Menuju Sebuah Imperium Amerika Baru ?", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Universitas Gadjah Mada*, Vol. 9, No.1, Juli, hlm.79

Cipto Bambang Dr, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkar, Yogyakarta, hlm.207-208

### Internet

United Nation, "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)", <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, diakses pada 11 Januari 2016

CNN International, "10 Fakta Mengenai Nuklir Iran", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-iran/>, diakses pada 5 Februari 2017

Liputan 6, "IAEA Sepakat Melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB", <http://global.liputan6.com/read/117095/iaea-sepakat-melaporkan-iran-ke-dewan-keamanan-pbb>, diakses pada 9 Januari 2017

BBC, "Dunia menyambut baik kesepakatan nuklir Iran", [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714\\_dunia\\_iran\\_nuklir\\_reaksi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_iran_nuklir_reaksi), diakses pada 10 Januari 2017

Anwar, Dewi Fortuna, "Tatatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat", *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003, hlm.17

Matt Grossmann and David A. Hopkins, “ Ideological Republicans and Group Interest Democrats: The Asymmetry of American Party Politics”,  
<http://www.matthewg.org/ideologicalrepublicans.pdf>, diakses pada 1 Juni 2017